



Gambaran Keuangan Daerah 3

3.1 Kinerja Keuangan di masa lalu

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Kinerja keuangan daerah di masa lalu dilihat dengan melakukan analisis terhadap kinerja pelaksanaan APBD dan kondisi neraca keuangan daerah sekurang-kurangnya lima tahun sebelumnya.

Dari sisi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan, sejak tahun 2016, laporan keuangan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini ini merupakan cerminan komitmen Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Postur APBD terdiri dari komponen Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Olehnya itu, perlu pemahaman tentang jenis objek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Analisis inilah yang diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang.

A. Pendapatan Daerah

Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, Aspek Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, belanja Tidak terduga, Belanja Transfer dan Aspek Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pendapatan Daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

PAD Kota Tidore Kepulauan terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Rata-rata sebanyak 6,94 persen dari Pendapatan Daerah bersumber dari PAD.

2. Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dalam kurun lima tahun terakhir, Dana Perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil pajak/bukan Pajak yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh 21, 22, 23 dan 24), Sumber Daya Alam (SDA), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU).

Rata-rata sebanyak 83,54 persen dari Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan bersumber dari Dana Transfer yakni dari Dana Perimbangan.

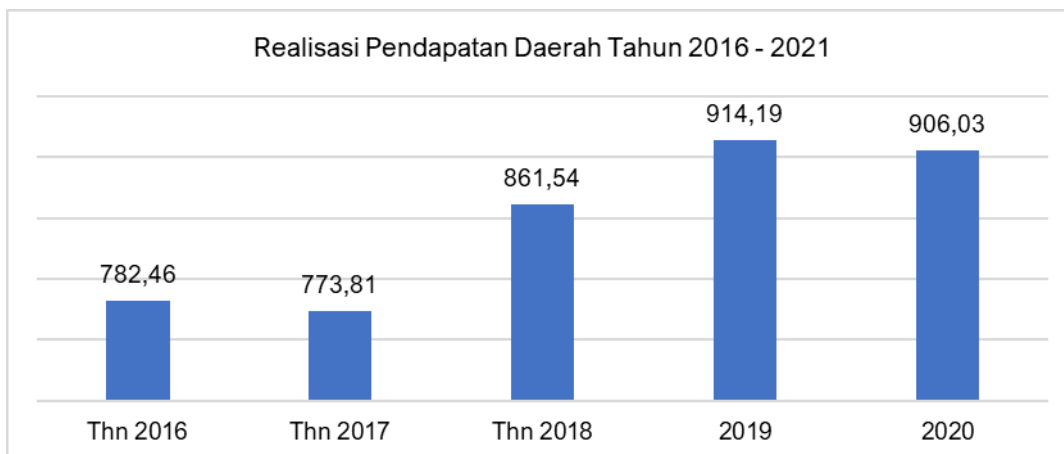
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil pajak dari Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan.

Rata-rata sebanyak 9,51 persen Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan bersumber dari kelompok ini, yakni dari Pendapatan Transfer Lainnya (7,12 persen), Transfer Pemerintah Provinsi (1,35 persen), dan Pendapatan Lain-lain yang Sah (1,04 persen).

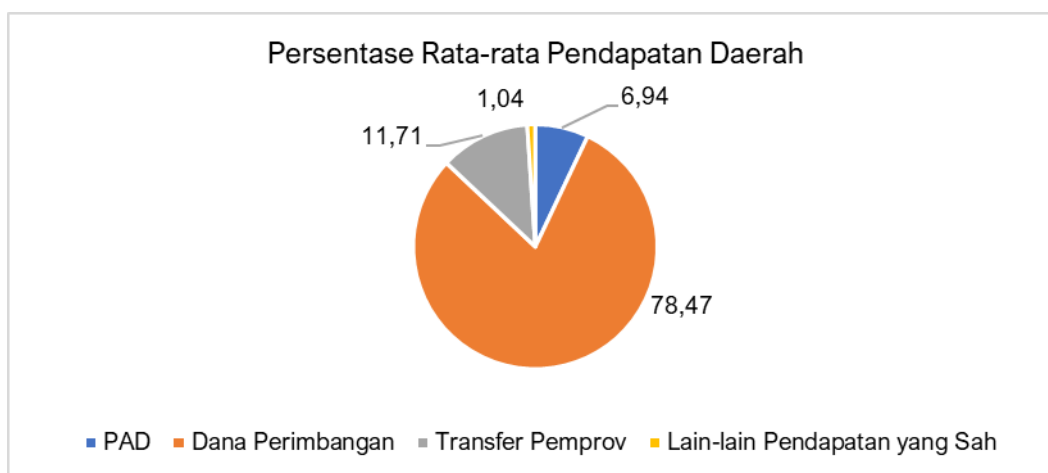
Pendapatan daerah sejak tahun 2016 hingga 2021 sangat fluktuatif. Tertinggi pada tahun 2019 yakni sebesar Rp 914,19 milyar. (Lihat Gambar 3.1). Pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan akibat kebijakan *refocusing* anggaran lewat dana perimbangan untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Kebijakan ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah, sebab komposisi terbesar Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan bersumber dana perimbangan, utamanya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Selain kebijakan dana transfer daerah, kondisi ekonomi yang sulit pada tahun 2020 telah mengharuskan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan untuk menanggihkan penagihan sebagian pajak dan retribusi daerah. Hal ini juga turut berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah. Sebagai contoh, pada tahun 2019 retribusi daerah menyumbang PAD sebesar Rp 6.280.171.127 namun pada tahun 2020 turun menjadi Rp 4.220.608.542.



Gambar 3.1.
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016 - 2021

Selama kurun waktu 2016 – 2020, persentase rata-rata Pendapatan Daerah dari komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya 6,94 persen, sementara Pendapatan Transfer dari dana perimbangan rata-rata 83,54 persen. Itulah sebabnya mengapa kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 sangat berpengaruh pada kondisi keuangan di daerah, termasuk berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di daerah yang pada tahun tersebut anjlok pada angka 1,99 persen.



Gambar 3.2.
Grafik Persentase Rata-rata Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2017 – 2020

Karena tahun 2020 dan 2021 termasuk dalam keadaan kahar, maka angka-angka Pendapatan Daerah pada tahun tersebut tidak dijadikan rujukan sepenuhnya untuk menyusun formulasi proyeksi Pendapatan Daerah untuk masa lima tahun ke depan. Tetapi menggunakan angka-angka pertumbuhan pada tahun 2016 sampai 2019 dengan memperhatikan kondisi tahun 2020 dan 2021.

Tabel 3.1 Realisasi Pendapatan Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Rata-rata (%)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN						
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH						
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	6.873.508.969	8.402.052.844	8.772.075.812	7.604.690.761	0,90	4,37
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	23.905.936.949	15.306.111.622	6.280.171.127	4.220.608.542	1,80	-31,20
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah	0	150.000.000	0	1.138.073.376	0,06	-100,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	20.462.193.633	34.046.624.205	52.723.159.847	68.543.756.584	4,18	79,63
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	51.241.639.551	57.904.788.671	67.775.406.786	81.507.129.263	6,94	20,65
1.2	PENDAPATAN TRANSFER						
1.2.1	Transfer Dari Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan						
1.2.2	Dana Bagi Hasil Pajak	7.911.307.773	8.845.603.352	6.442.368.200	8.643.686.934	1,06	-4,25
1.2.3	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	3.261.989.537	13.309.661.287	8.885.988.200	25.480.044.855	1,23	115,89
1.2.4	Dana Alokasi Umum	545.226.947.000	545.226.947.000	570.283.273.000	513.697.062.000	64,75	-1,77
1.2.5	Dana Alokasi Khusus	104.246.995.700	157.451.443.604	166.390.652.650	163.156.020.080	16,50	11,57
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	660.647.240.010	724.833.655.243	752.002.282.050	710.976.813.869	83,54	1,13
	Transfer Dari Pemerintah Pusat - Lainnya						
1.2.6	Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0,00	0
1.2.7	Dana Penyesuaian	48.494.505.000	66.930.624.988	67.615.050.988	85.435.947.000	7,12	23,91
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	48.494.505.000	66.930.624.988	67.615.050.988	85.435.947.000	7,12	23,91
	Transfer Pemerintah Provinsi						
1.2.8	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	11.436.794.810	11.868.268.818	14.047.607.283	11.885.346.069	1,35	11,71
1.2.9	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0	0	0	0	0,00	0
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	11.436.794.810	11.868.268.818	14.047.607.283	11.885.346.069	1,35	11,71
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	720.578.539.820	803.632.549.049	833.664.940.321	808.298.106.938	92,02	2,74
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH						
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.986.000.000	0	12.745.946.000	16.197.440.000	1,04	-52,88
1.3.2	Pendapatan Lainnya	0	0	0	23.991.429	0,00	0
	JUMLAH LAIN-LAIN PEND. YG SAH	1.986.000.000	-	12.745.946.000	16.221.431.429	1,04	-52,88
	JUMLAH PENDAPATAN	773.806.179.371	861.537.337.720	914.186.293.107	906.026.667.630	100	3,86

Sumber : BPKAD Kota Tidore Kepulauan, 2021 (diolah)

B. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewajiban daerah sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

- Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, yang terdiri dari belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Operasi pada APBD Kota Tidore Kepulauan antara Tahun 2016 – 2020 berkisar antara Rp 529.016.162.383 sampai Rp 601.321.038.637. Atau rata-rata 68,57 persen dari total Belanja Daerah.

Ada dua komponen Belanja Operasi rata-rata besar, yakni Belanja Pegawai (rata-rata 36,05 persen) dan Belanja Barang dan Jasa (rata-rata 29,13 persen). Sementara Belanja Hibah rata-rata 3,37 persen dari Belanja Daerah.

- Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: (1) Belanja Tanah; (2) Belanja Peralatan dan Mesin; (3) Belanja Gedung dan Bangunan; (4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan; (5) Belanja Aset Tetap Lainnya; dan (6) Belanja Aset Lainnya.

Selama Tahun 2016 – 2020, total Belanja Modal berkisar antara Rp 111.671.607.065 pada tahun 2017 sampai dengan Rp 196.597.221.969 pada tahun 2019. Atau rata-rata 19,3 persen dari total Belanja Daerah.

Rata-rata tertinggi adalah dari komponen Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan yakni 10,5 persen dari total Belanja Daerah. Dan yang terendah adalah Belanja Modal Aset Lainnya (rata-rata 0,06 persen).

- Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

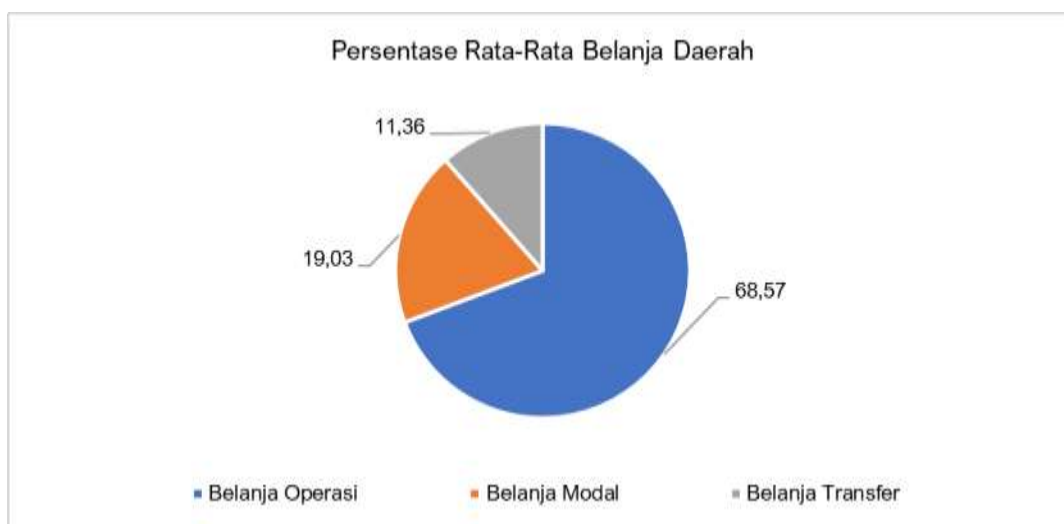
Persentase Belanja Tidak Terduga yang biasanya berkisar antara 0,1 persen dari total belanja, namun terkait pandemi Covid-19 maka tahun 2020 angka Belanja Tidak Terduga naik sebesar 3,91 persen atau Rp 32.373.396.762.

Jika dirata-ratakan, maka dalam kurun 2017 – 2020, persentase untuk Belanja Tidak Terduga adalah 1,05 persen dari total Belanja Daerah.

- Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Kelompok belanja transfer dirinci atas jenis Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Persentase rata-rata alokasi untuk Belanja Transfer adalah 11,36 persen. Untuk Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar 11,31 persen dan sebesar 0,05 persen untuk Belanja Bantuan Keuangan.



Gambar 3.3.
Grafik Persentase Rata-rata Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan
Tahun 2017 – 2020

Realisasi belanja daerah Kota Tidore Kepulauan pada periode 2017 – 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.2. Realisasi Belanja Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Persentase Rata-rata
2	BELANJA					
2.1	BELANJA OPERASI					
2.1.1	Belanja Pegawai	274.695.501.913	285.820.921.343	302.066.313.891	333.768.715.637	36,05
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	240.914.553.240	264.567.685.038	269.693.233.416	192.698.707.683	29,13
2.1.3	Bunga					
2.1.4	Subsidi					
2.1.5	Hibah	13.201.107.230	37.721.807.436	29.359.866.330	33.690.200.000	3,37
2.1.6	Bantuan Sosial	205.000.000	327.700.000	201.625.000	14.500.000	0,02
	JUMLAH BELANJA OPERASI	529.016.162.383	588.438.113.817	601.321.038.637	560.172.123.320	68,57
2.2	BELANJA MODAL					
2.2.1	Belanja Modal Tanah	964.040.000	7.095.942.980	2.869.192.735	1.795.522.600	0,37
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.395.977.727	29.421.455.794	47.757.553.900	50.279.104.310	4,08
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.902.909.049	26.202.800.185	57.966.839.215	44.606.526.326	4,25
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	80.937.639.000	107.297.168.580	86.223.763.396	59.720.534.618	10,05
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.316.486.289	2.109.434.084	1.520.572.723	814.697.416	0,21
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	154.555.000	1.455.686.500	259.300.000	303.075.000	0,06
	JUMLAH BELANJA MODAL	111.671.607.065	173.582.488.123	196.597.221.969	157.519.460.270	19,03
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA					
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	995.182.000	71.700.000	1.245.874.000	32.373.396.762	1,05
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	995.182.000	71.700.000	1.245.874.000	32.373.396.762	1,05
	JUMLAH BELANJA	641.682.951.448	762.092.301.940	799.164.134.606	750.064.980.352	88,64
3	TRANSFER					
3.1	Transfer Bantuan Keuangan					
3.1.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	98.230.438.186,00	96.569.892.000,00	103.499.113.288,00	76.607.472.281,00	11,31
3.1.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	383.942.000,00	412.920.000,00	345.761.000,00	424.161.000,00	0,05
	Jumlah Tansfer Bantuan Keuangan	98.614.380.186,00	96.982.812.000,00	103.844.874.288,00	77.031.633.281,00	11,36
	JUMLAH TRANSFER	98.614.380.186,00	96.982.812.000,00	103.844.874.288,00	77.031.633.281,00	11,36
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	740.297.331.634,00	859.075.113.940,00	903.009.008.894,00	827.096.613.633,00	100,00

Sumber : BPKAD Kota Tidore Kepulauan, 2021 (diolah)

C. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Rata-rata pertumbuhan realisasi pembiayaan netto Kota Tidore Kepulauan mulai tahun 2017 sampai dengan 2020 sebesar 349,30 persen dengan rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar 42,73 persen dan rata-rata pertumbuhan realisasi pengeluaran pembiayaan -5,04 persen. Sementara Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) cenderung mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 100,64

persen. Gambaran pembiayaan riil daerah selama tahun 2017 – 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.3. Realisasi Pembiayaan Kota Tidore Tahun 2017 – 2020

No	Uraian	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Persentase Rata-rata Pertumbuhan
4	PEMBIAYAAN					
4.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
4.1.1	Penggunaan SiLPA	10.343.960.545,00	35.634.304.202,00	31.787.967.971,00	35.465.252.184,00	42,73
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	10.343.960.545,00	35.634.304.202,00	31.787.967.971,00	35.465.252.184,00	42,73
4.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
4.2.1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	8.500.000.000,00	6.000.000.000,00	7.500.000.000,00	6.500.000.000,00	(4,44)
4.2.2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		307.947.241,00	0,00	4.900.449,00	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.500.000.000,00	6.307.947.241,00	7.500.000.000,00	6.504.900.449,00	(5,04)
	PEMBIAYAAN NETO	1.843.960.545,00	29.326.356.961,00	24.287.967.971,00	28.960.351.735,00	349,30
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN DAERAH (SILPA)	35.352.808.282,00	31.788.580.741,00	35.465.252.184,00	107.890.405.732,00	109,64

Sumber : BPKAD Kota Tidore Kepulauan, 2021 (diolah)

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen Pemerintah Daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada tanggal tertentu. Elemen utama neraca Pemerintah Daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci..

Tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio aktivitas. Rasio likuiditas terdiri rasio lancar (*current ratio*), rasio kas (*cash ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Rasio lancar (*current ratio*) adalah rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi. Rasio ini menunjukkan apakah Pemerintah Daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo.

Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu. Perkembangan Neraca Pemerintah Kota Tidore Kepulauan tahun 2016 - 2020 dan rasio keuangan Kota Tidore Kepulauan dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 3. 4 Analisis Rasio Keuangan Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasia Lancar (<i>Current Rasio</i>)	11,80	21,93	7,88	16,20	26,06
2	Rasio quick	1,51	11,19	7,88	7,98	18,21
3	Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset	0,0015	0,0014	0,0016	0,0015	0,0021
4	Rasio Hutang Terhadap Modal	0,002	0,002	0,002	0,002	0,003

Sumber : BPKAD Kota Tidore Kepulauan, 2021 (diolah)

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa rasio lancar Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mengalami peningkatan dari 11,80 pada tahun 2016 menjadi 26,06 pada tahun 2020. Walau sempat mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 7,88. Hal ini menunjukkan likuiditas Pemerintah Kota Tidore Kepulauan cukup bagus karena kemampuan membayar utangnya tinggi.

Sementara itu Rasio total hutang terhadap total aset dalam kurun waktu tahun 2016 – 2020 dibawah angka 1. Hal ini memiliki arti bahwa hutang yang dimiliki Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dapat ditutup dengan aset yang dimiliki. Demikian pula jika mencermati angka Rasio Hutang Terhadap Modal pada kurun waktu yang sama, dimana capaiannya dibawah angka 1. Artinya bahwa hutang yang dimiliki Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dapat ditutupi dengan investasi yang ditanamkan

Perkembangan aset Kota Tidore Kepulauan menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu tahun 2016 – 2020 sebesar Rp 1.657.589.477.707 pada tahun 2016 menjadi Rp 2.447.823.077.376 pada tahun 2020. Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter.

Tabel 3.5. Perkembangan Neraca Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 – 2020

NO	URAIAN	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	ASET					
1.1.	ASET LANCAR	29.437.065.383,00	55.311.102.863,00	24.153.817.238	53.087.207.222	132.062.747.995
1.1.1.	Kas	10.683.037.804,00	35.716.449.476,00	24.153.817.238	35.503.534.577	108.065.781.270
1.1.2.	Piutang	11.824.541.852,00	12.094.198.985,00	-	8.226.410.003	8.226.410.003
1.1.3.	Persediaan	6.929.485.727,00	7.500.454.402,00	-	9.357.262.642	15.770.556.722
1.2.	ASET TETAP	1.616.629.131.434	1.751.940.053.239	1.925.313.648.227	2.135.429.544.664	2.296.526.354.105
1.2.1.	Tanah	117.755.090.287	182.549.103.695	185.929.862.400	191.660.901.391	185.135.396.722
1.2.2.	Peralatan dan Mesin	200.114.925.017	201.124.280.176	229.579.161.451	276.517.946.722	340.117.212.912
1.2.3.	Gedung dan Bangunan	531.395.408.267	510.518.841.424	525.355.184.650	602.947.225.154	625.564.859.276
1.2.4.	Jalan, Irigaasi dan Jaringan	758.437.557.791	845.185.486.306	962.693.659.203	1.053.844.587.137	1.139.036.199.679
1.2.5.	Aset tetap lainnya	6.678.642.792	6.642.434.409	6.746.854.294	7.010.083.501	6.575.069.037
1.2.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	2.247.507.280	5.919.907.229	15.008.926.229	3.448.800.759	97.616.479
1.3.	ASET LAINNYA	11.523.280.890	61.245.641.988	15.777.611.724	14.867.478.106	19.233.975.636
1.3.1.	Tagihan penjualan angsuran					
1.3.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	-				
1.3.3.	Kemitraan dengan pihak kedua	-				
1.3.4.	Aset tak berwujud	4.641.715.988,00	4.796.270.988	6.251.957.488	6.785.733.388	7.068.176.688
1.3.5.	Aset lainnya	6.881.564.902,00	56449371000	9.525.654.236	8.081.744.718	12.165.798.948
	JUMLAH ASET DAERAH	1.657.589.477.707,02	1.868.496.798.089,70	1.965.245.077.189,00	2.203.384.229.991,96	2.447.823.077.736,00
2.	KEWAJIBAN					
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.493.723.938,00	2.522.046.356,00	3.064.357.233,00	3.276.481.181,00	5.067.442.364,00
2.1.1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	130.000,00	390.092.515	47.462.075	38.282.393	144.400.363
2.1.2.	Uang muka dari kas daerah					
1.1.3.	Pendapatan diterima dimuka	421.023,00	1.387.687,00	7.120.220	130.963.474	128.494.663
	Utang Belanja	1.866.275.784,00	1.922.537.910,00	2.192.269.714	2.872.337.719	4.637.978.852
	Utang Jangka Pendek Lainnya	626.897.131,00	208.028.244,00	817.505.224	234.897.595	156.568.486
2.1.4.	Dst.....					
3	EKUITAS DANA					
3.1	Ekuitas Dana lancar	1.273.706.812.224,00	1.426.043.453.611	1.496.945.055.004	1.609.233.442.777	1.748.543.545.571
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	1.276.200.536.162,00	1.428.565.499.967,00	1.500.009.412.237,00	1.612.509.923.958,00	1.753.610.987.935,00

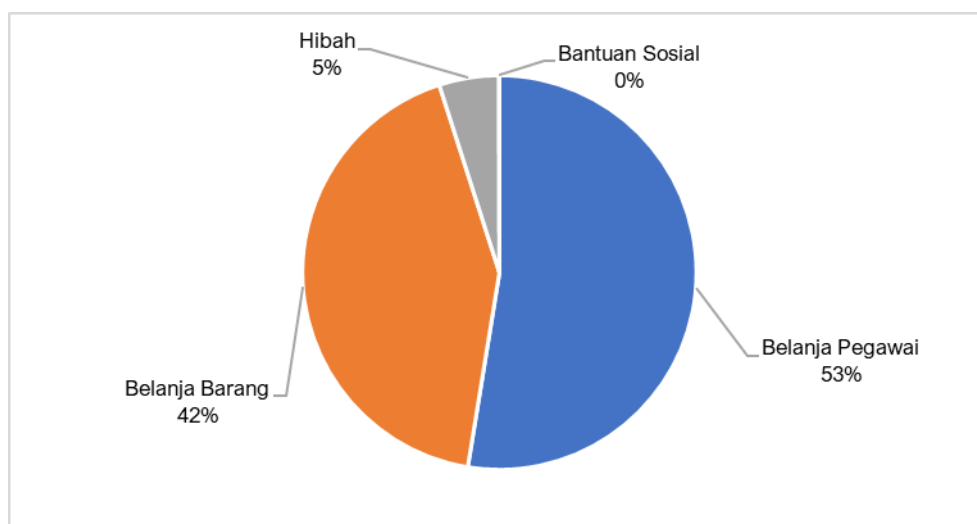
Sumber : BPKAD Kota Tidore Kepulauan, 2021

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus APBD yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan APBD yang disusun diarahkan pada kebijakan anggaran berimbang. Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasil Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Pengelolaan Belanja Daerah diupayakan mengarah pada anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja.

Tetapi dengan kondisi tidak berimbangnya antara jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan besaran Pendapatan Daerah menyebabkan proporsi realisasi Belanja Daerah didominasi oleh Belanja Operasi, yakni rata-rata dalam kurun waktu 2017 – 2020 sebesar 68,57 persen dari total Belanja Daerah. Belanja Operasi meliputi komponen Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Hibah dan Bantuan Sosial. Dari empat komponen ini, proporsi terbesar dialokasikan untuk Belanja Pegawai dan terkecil adalah Bantuan Sosial.



Gambar 3.4.
Grafik Persentase Rata-rata Realisasi Komponen Belanja Operasi
Tahun 2017 – 2020

Pelaksanaan APBD kurun waktu 2018 sampai dengan 2020 menunjukkan bahwa realisasi belanja Kota Tidore Kepulauan masih di bawah daripada realisasi pendapatan, sehingga pada periode tersebut APBD Kota Tidore Kepulauan mengalami surplus anggaran. Datanya diperlihatkan pada Tabel berikut.

Tabel 3. 6. Realiasi Pendapatan Daerah Berbanding Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Realisasi Pendapatan daerah	861.537.337.720	914.186.293.107	906.026.667.630
	dikurangi			
2	Belanja Daerah	762.092.301.940	799.164.134.606	750.064.980.352
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	6.307.947.241	7.500.000.000	6.504.900.449
	Surplus	93.137.088.539	107.522.158.501	149.456.786.829

Sumber : BPKAD Kota Tidore Kepulauan, 2021 (diolah)

Tabel tersebut menggambarkan bahwa diperlukan adanya perencanaan dan pelaksanaan APBD secara lebih mantap.

3.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan proyeksi penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan (2021 – 2024).

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi Pendapatan Daerah tidak dapat sepenuhnya menggunakan data pertumbuhan yang disajikan secara *time series* tahun 2017 – 2020. Sebab tahun 2020 dapat dikatakan mengalami keadaan kahar, yakni adanya pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan keluarnya kebijakan *refocusing anggaran* termasuk kebijakan pelonggaran penagihan retribusi dan pajak daerah. Olehnya proyeksi dilakukan dengan pendekatan pertumbuhan rata-rata (minus tahun 2020). Hasil proyeksi sebagaimana diperlihatkan pada Tabel berikut.

Tabel 3.7. Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2022 – 2026

No	Uraian	Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	PENDAPATAN					
1,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	9.000.000.000	9.150.500.000	9.324.012.400	9.740.213.000	10.002.419.000
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	8.259.308.700	8.259.817.400	8.269.563.000	8.912.900.000	9.545.900.000
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah					
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	42.752.204.000	50.770.553.600	51.151.332.700	53.708.899.300	56.394.344.300
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	60.011.512.700	68.180.171.000	68.744.908.100	72.362.012.300	75.942.663.300
1,2	PENDAPATAN TRANSFER					
1.2.1	Transfer Dari Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan					
1.2.2	Dana Bagi Hasil Pajak	7.359.255.000	8.989.434.411	9.248.745.019	9.711.182.270	10.196.741.383
1.2.3	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam	21.190.374.000	26.499.246.649	27.263.647.995	28.626.830.395	29.485.635.307
1.2.4	Dana Alokasi Umum	520.766.918.000	530.649.065.046	539.670.099.152	555.860.202.127	572.536.008.190
1.2.5	Dana Alokasi Khusus	175.212.201.000	170.824.353.024	173.018.277.012	178.208.825.322	183.555.090.082
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	724.528.748.000	736.962.099.130	749.200.769.178	772.407.040.114	795.773.474.962
	Transfer Dari Pemerintah Pusat - Lainnya					
1.2.6	Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0
1.2.7	Dana Penyesuaian	65.144.318.000	86.290.306.470	86.730.301.597	89.332.210.645	92.905.499.071
	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya	65.144.318.000	86.290.306.470	86.730.301.597	89.332.210.645	92.905.499.071
	Transfer Pemerintah Provinsi					
1.2.8	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	10.000.000.000	12.123.052.990	12.127.807.129	12.734.197.485	13.370.907.360
1.2.9	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya					
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	10.000.000.000	12.123.052.990	12.127.807.129	12.734.197.485	13.370.907.360
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	799.673.066.000	835.375.458.590	848.058.877.904	874.473.448.244	902.049.881.393
1,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH					
1.3.1	Pendapatan Hibah	13.356.300.000	14.776.870.000	15.262.793.200	15.720.676.996	16.192.297.306
1.3.2	Pendapatan Lainnya					
	JUMLAH LAIN-LAIN PEND. YG SAH	13.356.300.000	14.776.870.000	15.262.793.200	15.720.676.996	16.192.297.306
	JUMLAH PENDAPATAN	873.040.878.700	918.332.499.590	932.056.579.204	962.556.137.540	994.184.841.999

Sumber : BPKAD Kota Tidore Kepulauan, 2021 (diolah)

Tabel 3.8. Proyeksi Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2022 – 2026

No	Uraian	Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
2	BELANJA					
2.1	BELANJA OPERASI					
2.1.1	Belanja Pegawai	346.804.655.860	355.474.772.257	364.361.641.563	373.470.682.602	382.807.449.667
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	282.440.698.228	273.967.477.281	265.748.452.963	257.775.999.374	250.042.719.393
2.1.3	Bunga					
2.1.4	Subsidi					
2.1.5	Hibah	5.886.037.000	6.180.338.850	6.489.355.793	6.813.823.582	7.154.514.761
2.1.6	Bantuan Sosial	500.000.000	550.000.000	605.000.000	665.500.000	732.050.000
	JUMLAH BELANJA OPERASI	635.631.391.088	636.172.588.388	637.204.450.318	638.726.005.558	640.736.733.821
2.2	BELANJA MODAL					
2.2.1	Belanja Modal Tanah	820.954.000	1.231.431.000	1.847.146.500	2.770.719.750	4.156.079.625
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.087.868.399	46.164.353.663	44.317.779.517	43.874.601.721	43.435.855.704
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	77.352.892.177	81.220.536.786	85.281.563.625	89.545.641.806	94.022.923.897
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	76.055.427.692	79.858.199.077	83.851.109.030	88.043.664.482	92.445.847.706
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.514.430.600	2.388.709.070	2.269.273.617	2.155.809.936	2.048.019.439
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya					
	JUMLAH BELANJA MODAL	204.831.572.868	210.863.229.595	217.566.872.289	226.390.437.695	236.108.726.371
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA					
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	5.522.609.044	6.074.869.948	6.682.356.943	7.350.592.638	8.085.651.901
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	5.522.609.044	6.074.869.948	6.682.356.943	7.350.592.638	8.085.651.901
	JUMLAH BELANJA	845.985.573.000	853.110.687.932	861.453.679.550	872.467.035.891	884.931.112.093
3	TRANSFER					
3.1	Transfer Bantuan Keuangan					
3.1.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya					
3.1.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	104.430.662.700	107.041.429.268	109.717.464.999	112.460.401.624	115.271.911.665
3.1.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya					
	Jumlah Tansfer Bantuan Keuangan	104.430.662.700	107.041.429.268	109.717.464.999	112.460.401.624	115.271.911.665
	JUMLAH TRANSFER	104.430.662.700	107.041.429.268	109.717.464.999	112.460.401.624	115.271.911.665
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	950.416.235.700	960.152.117.199	971.171.144.549	984.927.437.515	1.000.203.023.758

Sumber : BPKAD Kota Tidore Kepulauan, 2021 (diolah)